

Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah Tahun 2022



Korban kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah jumlahnya terus meningkat dan membutuhkan pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam Rumah Aman dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula, perlu adanya pengembangan dari bentuk layanan yang optimal.

Penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebaiknya juga diikuti oleh pola kerja kemitraan dan keterpaduan tindak yang kreatif, cerdas, dan jitu untuk meningkatkan produktifitas kerja Petugas Penyedia Layanan/Tenaga Pendamping.

Petugas Penyedia Layanan/Tenaga Pendamping di Dinas PPPA dan/atau UPTD PPA tidak cukup hanya memiliki komitmen, melainkan harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sebagai upaya mempercepat pemulihan kesehatan dan mental korban pasca mengalami tindak kekerasan.

Hal tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas P3APPKB untuk mempersiapkan SDM yang berkompeten di Dinas PPPA dan/atau UPTD PPA dalam melakukan pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan tersedianya SDM yang kompeten dalam melakukan pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan juga pendampingan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Para pendamping perempuan dan anak korban kekerasan ini disiapkan memiliki fasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, serta kegiatan lainnya.

Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan dengan menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah ini diharapkan adanya peningkatan kapasitas SDM serta terjalinnya koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan petugas penyedia layanan di Dinas PPPA dan/atau UPTD PPA di Provinsi Kalimantan Tengah selaku pendamping korban kekerasan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga pelayanan dan pendampingan menjadi lebih baik dan prima, dan korban kekerasan merasakan kenyamanan dalam penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa mereka.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan melalui Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari Senin – Selasa , tanggal 28 s/d 29 November 2022, bertempat di Hotel Aquarius Boutique Palangka Raya.

Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan melalui Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah berjumlah 7 (tujuh) orang berasal dari :

1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
2. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
3. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
5. UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah;
6. HIMPSI Wilayah Kalimantan Tengah;
7. DPC Peradi Palangka Raya.

Moderator berasal dari Dinas P3AP2KB Prov. Kalteng yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Bapak Ir. Evangelis, M.Si dan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Ibu Partiani, SKM., M.M.Kes.

Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan melalui Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Se Kalimantan Tengah berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang peserta yang berasal dari Petugas Penyedia Layanan/Tenaga Pendamping di Dinas PPPA dan/atau UPTD PPA, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Polres Palangka Raya.

Anggaran Kegiatan Sebesar Rp. 48.570.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

**SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
TAHUN 2022**

Terwujudnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan program Perlindungan Anak, kepada aparat Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan seluruh stakeholder terkait, diselenggarakan dengan memberikan pembekalan informasi tentang fenomena dan fakta perdagangan orang serta eksploitasi seksual anak yang marak terjadi. Hal tersebut sebagai upaya penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak, serta mempercepat upaya pemerintah daerah membentuk regulasi daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Sosialisasi dilakukan dengan maksud untuk melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan mengalami kekerasan. Sosialisasi juga bertujuan untuk mengenalkan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; Untuk percepatan upaya pemerintah daerah membentuk regulasi daerah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; Memperkuat peran dan kapasitas Aparatur Perangkat Daerah, instansi vertikal serta seluruh stakeholder dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan; Munculnya tindakan antisipasi Pemerintah yang didukung *stakeholders* dalam meminimalisir perdagangan orang khususnya perempuan dan anak

Pembiayaan berasal dari DPA-SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 85.608.200

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO





SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TAHUN 2023

Tanggal 9 Mei 2022 menjadi momentum penting dan bersejarah bagi upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual di Indonesia. Presiden Jokowi secara resmi telah mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Mengawal dan memastikan Implementasi penyelenggaraan UU TPKS harus bersama sama dilakukan oleh semua pihak. Selain keluarga, partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sangat berperan penting, hal ini juga telah diatur dalam UU TPKS.

Sosialisasi semata tentunya tidaklah cukup, pendekatan melalui edukasi yang berkesinambungan tidak hanya kepada perempuan dan anak tetapi juga keluarga sebagai garda terdepan yang memfilter keluarga dari ancaman kekerasan seksual serta tidak kalah penting adalah advokasi kepada masyarakat agar mereka berani dan berdaya untuk menyuarkan kekerasan seksual yang dialami.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dapat menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual, sehingga prinsip *zero toleranse* kekerasan seksual bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Lahirnya UU TPKS merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Guna memaksimalkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam mendukung hal itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melaksanakan Sosialisasi UU TPKS.

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dengan kegiatan sosialisasi UU TPKS di laksanakan 4 (empat) kali kegiatan, yaitu di :

- Di Kota Palangka Raya (Tingkat Provinsi)
- Di Kabupaten Kapuas
- Di Kabupaten Pulang Pisau
- Di Kabupaten Kasongan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi UU TPKS Kewenangan Provinsi dilakukan secara online dan offline dengan menampilkan paparan dari Narasumber, sesi panel dan diskusi serta tanya jawab.

Pembiayaan berasal dari DPA-SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 86.918.000 (Tingkat Provinsi) dan Rp. 113.081.992 (Tingkat Kabupaten)

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TINGKAT
PROVINSI**

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TINGKAT POVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023







DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

1. Kabupaten Pulang Pisau





2. Kabupaten Kapuas





3. Kabupaten Katingan





ADVOKASI PEMBANGUNAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TAHUN 2022

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

Terkait ukuran keberhasilan dari pembangunan dan pengembangan DRPPA, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang komprehensif.

Pembiayaan berasal dari DPA-SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 56.564.000

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI PEMBANGUNAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA)

1. Kabupaten Pulang Pisau



2. Kabupaten Kotawaringin Timur





SOSIALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT TAHUN 2022

Terwujudnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan program Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan anak kepada aparat Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan seluruh stakeholder terkait, diselenggarakan dengan memberikan pembekalan informasi berupa sosialisasi tentang fenomena dan fakta yang sering terjadi. Hal tersebut sebagai upaya penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang dapat terlanggarkan pada saat kejadian bencana.

Pada setiap penanggulangan bencana perempuan dan anak menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya memberikan perlindungan kepada kelompok ini dalam menghadapi masa sulit di saat bencana. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mendorong beberapa hal yang otomatis dapat diterapkan saat bencana.

Terkait dengan konteks perempuan dan anak, khususnya di saat bencana, kegiatan yang dapat dilakukan adalah pertama, data pilah berbasis gender. Data terpilah ini perlu dilakukan secara otomatis sejak awal, misalnya perencanaan tenda atau fasilitas di pos pengungsian atau penentuan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan penanganan kebencanaan, seperti tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi atau pemulihan sangat penting dilakukan.

Di sisi lain, kebutuhan spesifik pada perempuan dan anak perlu untuk disiapkan. Hal tersebut dapat bertujuan untuk menghindarkan mereka dari risiko, seperti kekerasan, pelecehan seksual dll. Namun demikian, kebutuhan ini tidak hanya menyasar mereka, tetapi juga kelompok rentan lain seperti lanjut usia dan disabilitas. Sebagai contoh pada saat terjadi pengungsian, pos komando dapat menyediakan tenda khusus untuk mencegah kekerasan, tenda layanan khusus ibu hamil dan ibu melahirkan maupun layanan psikososial.

Peran perempuan di pengungsian mempunyai peran ganda/double, hak - hak perempuan di lokasi bencana dapat terpenuhi jika pendataan korban, jumlah korban perempuan, lansia, anak, laki - laki, dilaksanakan dari awal. Kondisi khusus di pengungsian berarti butuh perhatian yang khusus pula, khususnya pada lansia, anak, disabilitas, ibu hamil/menyusui.

Sosialisasi kebijakan hak perempuan dalam situasi Darurat atau bencana bertujuan untuk meningkatkan komitmen, memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah, aparat perangkat Pemerintah Daerah dan Masyarakat, instansi vertikal serta seluruh stakeholder dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsive terhadap perempuan, kebutuhan

dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memberi ruang yang aman bagi anak pada saat bencana, serta meningkatkan kebersamaan antara elemen masyarakat dengan pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan anak pada saat terjadi bencana.

Pembiayaan berasal dari DPA-SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 42.361.750

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT**



Gambar 1. Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sambutan dan laporan kegiatan



Gambar 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun menyampaikan sambutan Sekda sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan



Gambar 3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI selaku Narasumber menyampaikan materi melalui Zoom Meeting



Gambar 4. Narasumber dari BPBD Provisini Kalteng, Alpius Patanan, S.Hut menyampaikan materi mengenai Gambaran dan situasi Bencana di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 5. Situasi peserta kegiatan saat Narasumber menyampaikan materi



Gambar 6. Situasi saat peserta mengikuti paparan Narasumber melalui *Zoom Meeting*

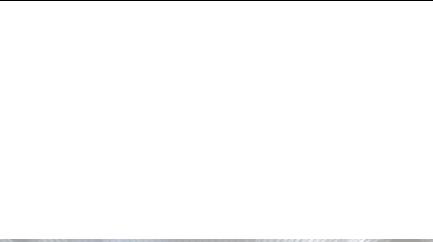


Gambar 7. Kegiatan dipandu oleh Moderator, Ir. Evangelis, M.Si selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas P3APPKB Prov. Kalteng



Gambar 8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Prov Kalteng beserta Kepala P3APPKB Prov Kalteng dan jajarannya melakukan sesi foto bersama peserta kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN PADA TAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	DESKRIPSI	FOTO KEGIATAN
1.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 70.000.000	Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender yang memberikan pelatihan dalam membuat GAP dan GBS dengan anggaran yang tersedia di sopd yang tidak membuat program dan kegiatan yang baru akan tetapi anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat ,partisipasi, pengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Peserta berjumlah 44 SOPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Maret 2022.	
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Rp 70.000.000	Kegiatan Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat.	
3.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Rp 55.135.000	1. Kegiatan Pemantapan Jejaring Kelembagaan Bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, dengan jumlah peserta berjumlah 30 dari organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat dengan tujuan agar organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan organisasi perempuan menyamakan persepsi dan mendukung program dan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan anak. kegiatan di laksanakan di Aula Bawi Bahalap Lt.2 Pada Dinas DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Oktober Tahun 2022	
				Rp 49.865.000	2. Capacity Building Bagi Perempuan Industri Rumahang di Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di Aula Bawi Bahalap Lt.2 Pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022. Peserta berjumlah 25 perempuan Industri Rumahang yang merupakan binaan dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Packing dan tehnik marketing secara digital.	
				Rp 500.000.000	Dana Hibah Untuk DWP Provinsi Kalimantan Tengah	
				Rp 350.000.000	Dana Hibah Untuk BKOW Provinsi Kalimantan Tengah	
4.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengembangan Pelaksanaan PUG Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Rp 48.500.000	Merupakan Rakor Pelaksanaan PUG Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota Se-Kalimantan Tengah, dengan jumlah peserta 4 tim driver yaitu Insektorat, Badan Keuangan Daerah Bappedalitbang dan Dinas P3APPKB dari 14 Kabupaten Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappedalitbang.	
5.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 41.278.439	Merupakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Abon dan Pempek Berbahan Ikan Bagi Perempuan Industri Rumahang di Kota Palangka Raya. Peserta merupakan binaan dari Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 25 Perempuan industri Rumahang yang masih tingkat pemula, dalam pelatihan ini dilatih dan praktek membuat abon dan pempek berbahan ikan oleh instruktur yang telah berkompeten dibidangnya. kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah Pada tahun 2022.	

<p>Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Masyarakat Kewenangan Provinsi</p>	<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi</p>	<p>Rp 114.681.350</p>	<p>kegiatan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ke 94 dengan rangkaian peringatan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sahaman Lampung, dan Puncak Peringatan Hari Ibu ke 94 yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Lt.2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah .</p>	
					